

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN FESTIVAL TAHUNAN CAP GO
MEH DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN KAMTIBMAS YANG PRIMA
(Studi Di Polres Kabupten Sambas)**

**OLEH:
EKO MARDIANTO, S.I.K
NPM. A2021151082**

ABSTRACT

This thesis discusses about Police Strategy in Securing Captain Meh Annual Festival in Achieving Prime Kamtibmas Service (Study At Resort Police Kabupten Sambas). This research uses normative legal research method, through literature study and sociological research method. From the results of this thesis research, it is concluded that the dominant factor affecting the implementation of the security of Cap Go Meh Annual Festival in relation to the excellent security and public order service by Sambas Police towards tourism Captain Meh Annual Festival in the effort of tourism development in Sambas Regency is in the implementation of potential development Tourism in Sambas Regency there are some things that become supporting factors and inhibiting factors. Driving factors in the development of tourism potential is a strong commitment, the structure of government agencies, the potential and diversity of Natural Resources and cultural diversity. Inhibiting factors are the quality of human resources of tourism actors is still low, the exploitation of natural resources that have not been controlled, and the influence of outside culture. That the Polres is in charge of carrying out the basic duties of the Police in maintaining security and public order, upholding the law, and providing protection, protection and service to the community and carrying out other Polri duties within the police area, in accordance with the provisions of the law

Keywords: Cap Go Meh, Kamtibmas Service

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Strategi Kepolisian Dalam Pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh Dalam Mewujudkan Pelayanan Kamtibmas Yang Prima (Studi Di Polres Kabupten Sambas). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan dan metode penelitian sosiologis.. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh dalam kaitannya dengan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima oleh Polres Sambas terhadap kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sambas yaitu dalam pelaksanaan pembangunan potensi wisata di Kabupaten Sambas terdapat beberapa hal yang menjadi factor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendorong dalam pengembangan potensi wisata yaitu adanya komitmen yang kuat, struktur lembaga pemerintah, potensi dan keanekaragaman Sumber Daya Alam dan keanekaragaman budaya. Faktor penghambat yaitu kualitas SDM pelaku pariwisata masih rendah, eksploitasi SDA yang belum terkendali, dan pengaruh budaya luar. bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Cap Go Meh, Bidang, Pelayanan Kamtibmas.

Latar Belakang

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu Institusi atau badan pemerintahan yang memiliki fungsi, tugas pokok dan wewenang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang: **(a) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;** (b) penegakan hukum; (c) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Ketiga fungsi, tugas pokok dan wewenang tersebut: “Bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.²

Karena itu, ketiganya dirumuskan ke dalam satu istilah (pengertian) umum sebagai berikut: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat”.³

Jika dioperasionisasikan terdapat variable-variabel pokok yang dikandung pengertian tersebut :

- a. Kondisi dinamis masyarakat: adalah keadaan tata kehidupan masyarakat yang penuh semangat, terus bergerak untuk menghasilkan perubahan yang membawa kemajuan.⁴
- b. Prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional: ialah rencana pembangunan berskala nasional sebagai konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa dalam kurun waktu tertentu – jangka panjang, menengah dan tahunan.⁵
- c. Tujuan nasional, ialah: sebagaimana termaktub pada alinia keempat pembukaan UUD 1945, bahwa negara: (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

¹ Pasal 2, Pasal 13 s.d. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002.

² Penjelasan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002

³ Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2002.

⁴ Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, Hlm. 345.

⁵ Undang-Undang Propenas 1999-2004.

Indoneisia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) ikut serta dalam perdamaian dunia. Kesemuanya itu pelaksanaannya berbasis pada landasan filosofis Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.

- d. Terjaminnya keamanan: ialah kondisi bebas dari rasa takut pada diri setiap warga masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terhadap segala bentuk gangguan, hambatan, dan ancaman fisik, terhadap keselamatan jiwa dan harta benda yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal dan anti sosial.
- e. Ketertiban: ialah keteraturan melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan yang diatur berdasarkan hukum, norma agama, norma sosial, dan norma-norma lainnya yang berlaku.
- f. Tegaknya hukum: ialah: "...suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan".⁶ Keinginan hukum tiada lain adalah keinginan rakyat yang dinormatiskan ke dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan hukum berupa kebenaran, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Efektivitas penegakan hukum sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima faktor utama : (1) Sumber daya peraturan perundang-undangan; (2) Sumber daya manusia penegakan hukum; menyangkut kesiapan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di jajaran institusi penegakan hukum; (3) Sumber daya fisik penegakan hukum; berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan penegakan hukum; (4) Sumber Daya Keuangan; ialah anggaran yang harus dipersiapkan untuk membiayai personil, sarana dan prasarana penegakan hukum; (5) Sumber Daya Pendukung lainnya; seperti kesadaran hukum warga masyarakat dan pra kondisi yang perlu dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.⁷
- g. terbinanya ketenteraman, yang mengandung: (1) kemampuan membina kedamaian tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum; dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Untuk mewujudkan fungsi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan Grand Strategi Polri 2005 – 2025 berdasarkan Keputusan KAPOLRI NO POL. : SKEP/360/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005. Substansinya terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu :

1. Tahap I *Trust Building* pada periode tahun 2005 – 2009 : Membangun kepercayaan Polri di mata publik / masyarakat merupakan faktor penting dalam Grand Strategi Polri karena merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan (*Trust Building*), meliputi : bidang kepemimpinan, sumber daya manusia yang efektif, *Pilot Project* yang diunggulkan berbasis *hi-tech*, kemampuan penguasaan perundang-undangan dan sarana prasarana pendukung Visi misi Polri
2. Tahap II *Partnership Building* pada periode tahun 2010-2014: Membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian

⁶ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN, Departemen Kehakiman, tt, Jakarta: Sinar Baru, Hlm. 18-24.

⁷ *Ibid.*

dalam penegakan hukum dan ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat untuk menciptakan rasa aman.

3. Tahap III *Strive for Excellence* periode tahun 2015 – 2025 : Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good governance, best practices* Polri, profesionalisme SDM, implementasi teknologi, infrastruktur, material fasilitas dan jasa guna membangun kapasitas Polri (*capacity building*) yang kredibel di mata masyarakat Nasional, Regional dan Internasional.

Selanjutnya dalam Grand Strategi tersebut ditetapkan pula Visi dan misi Polri yakni :

- a. Visi : Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.
- b. Misi :
 1. Mengutamakan peran perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa aman masyarakat (public safety);
 2. Proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan dan pelanggaran dengan mengefektifkan community policing guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (crime prevention);
 3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, keadilan dan kepastian hukum;
 4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi / lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka memulihkan keamanan dalam negeri;
 5. Membangun kelembagaan Polri serta mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. Membangun mobilitas dan sebaran pelayanan kepolisian serta teknologi informasi yang memadai guna mendukung penanggulangan kejahatan dan dinamikanya;
 7. Melaksanakan kerja sama kepolisian internasional.

Sejalan dengan visi dan misi POLRI di atas, Kepolisian Resort Sambas telah melaksanakan berbagai kegiatan KAMTIBMAS baik dalam bentuk operasi rutin, implementasi POLMAS, penegakan hukum, patroli malam hari, maupun pertemuan (dialog publik) dengan Tokoh Masyarakat (TOMAS), Tokoh Adat (TODAT), Tokoh Agama (TOGA), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), dan Kepala Desa.⁸ Hasilnya dapat dikatakan cukup kondusif, antara lain dapat disimpulkan dari indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemilukada Sambas pertama 9 Desember 2015 terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas periode 2016 – 2021;
- b. Kegiatan Penyambutan Malam Pergantian Tahun 2016.
- c. Perayaan Cap Go Meh Februari 2016 berjalan aman dan tertib.
- d. Perayaan hari lebaran idul fitri 1437 H berjalan aman, tertib dan lancar.

Sungguhpun demikian, mengingat Kabupaten Sambas merupakan daerah yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, yang juga merupakan daerah yang di beri gelar Serambi Mekah, dan rawan konflik SARA, tentunya potensi gangguan, ambang gannguan dan ancaman

⁸ Pontianak Post, 15 Oktober 2010.

faktual tetap terbuka peluangnya untuk terjadi di tengah-tengah masyarakat kapan dan di mana pun juga di wilayah Kabupaten Sambas.

Secara teoretik konsep keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Sebagai contoh, masalah pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi mengandung "potensi gangguan" apabila tidak ditanggulangi dengan baik. Situasi lanjutan dari masalah pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi tersebut mendorong terjadinya kejahatan yang dikenal dengan istilah "ambang gangguan". Sedangkan peristiwa kejahatan merupakan eskalasi dari situasi dan kondisi "gangguan nyata" atau "ancaman faktual".

Pola penanggulangan Kamtibmas pun harus disesuaikan dengan ketiga proyeksi tersebut :

- a. Untuk "potensi gangguan", strategi penanggulangan yang digunakan adalah "pencegahan". Strategi ini bersifat mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor dalam kehidupan masyarakat, terutama yang bersifat negatif dan berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melalui pembinaan.
- b. Untuk "ambang gangguan", strategi penanggulangan yang digunakan bersifat "penangkalan". Kerentanan kondisi tersebut diatasi melalui upaya "penangkalan" dengan sasaran untuk mengurangi "faktor kesempatan" dan menurunkan "faktor niat", melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli.
- c. Sedangkan untuk menghadapi "ancaman nyata" maka strategi yang digunakan bersifat "penegakan hukum".

Ketiga jenis strategi dan pola penanggulangan di atas dalam pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Polri, melainkan harus juga melibatkan potensi masyarakat dan unsur institusi terkait sesuai batas kewenangannya masing-masing. Dengan melibatkan potensi masyarakat dan institusi lainnya itu, maka secara hipotetis semua gangguan Kamtibmas dalam berbagai bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, kerusuhan massal, bencana alam, dan gerombolan bersenjata pada prinsipnya akan dapat ditanggulangi secara efektif.

Akan tetapi, menurut praktiknya tidaklah semudah yang dihipotiskan. Sebab terdapat banyak faktor yang berpengaruh, antara lain:

- a. Kewilayahan, kependudukan dan sumber daya alam;
- b. Situasi dan kondisi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat;**
- c. Kelengkapan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis;
- d. Kuantitas dan kualitas personil kepolisian;
- e. Kesiapan sarana dan prasarana kepolisian;
- f. Kecukupan sumber daya keuangan (anggaran); dan
- g. Kondisi kesadaran hukum masyarakat dan asumber daya pendukung lainnya;

Sehubungan dengan pelaksanaan program di atas, maka proses pengelolaan kamtibmas jelas memerlukan manajemen strategik berdasarkan prinsip *bottom up planning* dan *top down planning*, dari tingkat ujung tombak (satker) sampai kebijakan umum menuju implementasi yang terkendali dan *accountable*, dengan tahapan:⁹

1. indentifikasi aktifitas pokok dan penunjang yang perlu dikerjakan baik langsung maupun tidak langsung sejak proses perencanaan program dan kegiatan, implementasi, pengendalian dan pengawasan.
2. analisis profil/postur organisasi untuk mencari keterkaitan (*linkage*) dari berbagai aktifitas rantai kegiatan, baik antar aktifitas pokok dan aktifitas penunjang.
3. penerapan metode kerja yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.
4. mencari sinergi potensial yang mungkin dapat ditemukan diantara output yang dihasilkan oleh setiap aktifitas yang dimiliki oleh organisasi, sehingga lebih efektif dan efisien.

Dalam kaitannya dengan pengamanan wisata religi Tahun Baru Imlek dengan tradisi Cap Go Meh, Kepolisian resor sambas telah menyiapkan personil dalam menyambut perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2016 di Kabupaten Sambas. Sejumlah 170 personel untuk mendukung pengamanan selama kegiatan Imlek dan Cap Go Meh 2016. Kepolisian resort Sambas telah menyiapkan personel untuk pengamanan pawai tatung pada perayaan Cap Go Meh di beberapa tempat yaitu, Kecamatan Selakau, Pemangkat, Tebas dan Sambas. Rekayasa alur lalu-lintas juga telah disiapkan untuk menghindari kemacetan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Cap Go Meh Kapolda Kalimantan Barat memerintahkan kepada polres yang ada di wilayah Kalimantan Barat tidak terkecuali Polres Sambas, bahwa aparat kepolisian dituntut juga untuk lebih fokus dan waspada terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan terorisme. Hal ini dibuktikan dengan Operasi Lion kapuas 2016 di seluruh wilayah polres di Kalimantan Barat. Untuk daerah Kabupaten Sambas, Polres Sambas melakukan sterilisasi tempat yang menjadi lokasi penting, yang digunakan untuk kegiatan masyarakat selama Imlek dan CGM berlangsung. Di samping itu, Polres juga menempatkan petugas kepolisian bersama dengan unsur masyarakat pada titik-titik tertentu, supaya tercipta kamtibmas di wilayah hukum kabupaten sambas.

Permasalahan

Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak Polres Sambas dalam pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh di Kabupaten Sambas ?

⁹ Tommy Hartomo, Ditrenbangpuan Ditjen Rensishan, Makalah, MANAJEMEN STRATEGIK, Berpikir Cerdas, Strategik dan Proses Manajemen, Jakarta, 2004.

Pembahasan

Perkembangan perubahan dinamika sosial masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang berdampak terhadap keamanan dalam negeri berlangsung dengan cepat, perkembangan tersebut sangat mempengaruhi meningkatnya berbagai kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berdampak kontijensi.

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Polres juga memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan segala dinamika masyarakat dalam rangka pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Ketapang dan jajarannya melalui pembinaan dengan mengimpelementasikan strategi peningkatan kualitas pelayanan dalam menindak lanjuti arah kebijakan Kapolda Kalbar dalam mendukung Revitalisasi Polri menuju Pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Ketapang secara proaktif, transparan dan akuntabel.

Langkah-langkah pembinaan yang di ambil dalam Implementasi strategi fungsi Bimmas di Polres Ketapang mengambil kebijakan yaitu dengan memberdayakan dan membentuk seluruh anggota Polri diseluruh wilayah hukum Polres Ketapang agar :

1) Membangun Polri Yang Berwatak Sipil

Kompleksnya masalah yang dihadapi Polri untuk menuju polisi sipil dalam masyarakat modern dan demokratis hanya mungkin dilaksanakan dengan kemampuan yang profesional dengan memberikan pengetahuan konseptual dan teoritikal mengenai berbagai permasalahan sosial kepolisian kepada para anggota Polri maka semakin jelas bahwa kebutuhan ilmu pengetahuan kepolisian harus menjadi bagian dari pengembangan profesi seorang polisi yang diharapkan mampu mengidentifikasi dan memahami setiap permasalahan yang dihadapi serta pemecahan yang rasional. Dalam istilah Polisi sipil dijelaskan beberapa pengertian-pengertian antara lain sebagai berikut :

- a) Polisi Sipil menghormati hak-hak sipil; Masyarakat demokratis membutuhkan polisi sipil yang mampu berperan sebagai pegawai sipil. Nilai-nilai ini telah dirumuskan dalam Hak Asasi Manusia yang dijamin sebagai hukum positif negara (*the guardian of civilian values*).
- b) Sipil mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karakter sipil secara luas dikaitkan dengan nilai-nilai peradaban (*civilization*) dan keadaban (*civility*). Pada polisi sipil melekat sikap budaya yang sopan, santun, ramah, tidak melakukan kekerasan, dan mengedepankan persuasi menjadi ciri utamanya.
- c) Pengertian sipil secara diametral jauh dari karakteristik militer, sejalan dengan definisi yang diangkat dalam perjanjian hukum internasional yang meletakkan kedudukan polisi sebagai kekuatan yang tidak terlibat perang (*non-combatant*), sementara militer didesain untuk berperang (*combatant*). Fungsi kepolisian ditujukan untuk menciptakan keamanan dalam negeri, ketertiban dalam masyarakat, pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, penegakan hukum dan pemolisian masyarakat (*community policing*). Dan kualitas polisi sipil diukur dari kemampuannya untuk menjauhkan diri dari karakter militer dan mendekatkan diri kepada masyarakat.
- d) Polisi Sipil juga berbeda dengan Polisi Rahasia. Polisi sipil mengabdikan kepada kepentingan masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan. Mempunyai karakteristik sebagai polisi masyarakat, yaitu polisi yang menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat. Dalam karakter ini, polisi harus mewujudkan pola kerja yang menyalami, merangkul dan menyayangi masyarakat (*police whocares*), mengedepankan penggunaan komunikasi kepada masyarakat, tidak mengandalkan peluru tajam. Kebalikannya Polisi Rahasia adalah polisi yang taat, patuh dan mengabdikan kepada kepentingan politik penguasa yang sering berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sebagai komponen yang penting dalam sistem pemerintahan yang otoriter, polisi rahasia sering dilekatkan dengan tindakan yang represif, pengekangan kebebasan kepada masyarakat, penangkapan semena-mena, bahkan penyiksaan. Konsepsi tentang polisi rahasia juga sering dilekatkan dengan konsepsi tentang polisi negara (*state police*).

Satu upaya untuk menegaskan membentuk anggota Polri jajaran Polres Sambas menjadi polisi sipil dan melepas paradigma yang masih berbau militer adalah dengan mengembangkan pemolisian masyarakat (*community policing*) di kepolisian.

Polisi sipil dikatakan sebagai "polisi dari rakyat untuk rakyat". Kedekatan dengan rakyat, menjadi ciri penting polisi sipil. Di manapun di dunia, polisi digolongkan sebagai kekuatan para militer. Ini membuatnya harus bekerja keras untuk bisa "*moving away from military configuration*". Polisi sipil lebih diwakili oleh "pelayanan" (*Service*) dari pada kekuatan (*Force*). Banyak hal yang harus menjalani dekonstruksi sebelum sampai kepada pelayanan, termasuk pengubahan mental dan karakteristik anggota Polri jajaran Polres Sambas.

Dalam masyarakat modern, dinamika kehidupan berjalan sangat kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi memperebutkan sumber-sumber ekonomi dan produksi. Akibatnya untuk dapat bertahan hidup dituntut adanya produktivitas dan kreativitas. Bagi yang tidak dapat melakukannya akan menjadi beban bagi orang lain dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polres Samabas pada hakikatnya lahir bersamaan dengan kebutuhan masyarakat akan ketentraman dan ketertiban serta kepatuhan atas norma sosial yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat di jajaran Polres Sambas dan sebagai suatu kekuatan pemaksa dibentuk setelah pranata informal tidak mampu mengatasi masalah-masalah, gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum sehingga merupakan kendala bagi upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Visi Polri saat ini bukan sekadar sebagai aparat penegak hukum, tapi sebagai polisi yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat; penegak hukum yang profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM; pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera, sehingga pembangunan Polri diarahkan menuju polisi sipil (*Civilian Police*).

Salah satu faktor penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya adalah adanya rasa aman dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya. Masalah keamanan inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama petugas kepolisian dalam masyarakat. Polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tapi berfungsi juga sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Yaitu untuk melindungi harkat dan martabat manusia, memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan dengan tujuan warga masyarakat dapat hidup dan bekerja maupun melaksanakan aktivitasnya dalam keadaan aman dan tentram. Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis menjadi polisi yang protagonis.

2). Membangun Polri Yang Profesional

Pengertian umum tentang profesional yaitu menggunakan teori ilmu pengetahuan untuk pekerjaan, menggunakan keahlian yang didasarkan pada pendidikan dan pelatihan berjangka panjang, memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya, memiliki otonomi dan cara mengontrol perilaku anggota profesi. Suatu pekerjaan hanya dapat dinamakan profesi, apabila pekerjaan itu memerlukan sejumlah kemahiran / keahlian (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang khusus, dan didasarkan pada persiapan akademik dalam ilmu pengetahuan tertentu. Profesionalisme polisi mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas (*conduct, aims and qualities*) pekerjaan polisi.

Profesionalisme polisi tidak dapat dilepaskan dari peranan yang diharapkan oleh masyarakat tentang apa yang merupakan tugas pokok kepolisian (sebagai organisasi). Pendekatan polisi dalam menyelesaikan masalah (dinamakan juga "*peace-keeping orientation*") akan lebih memfokuskan hubungan polisi dengan masyarakat pada apa yang dapat dikerjakan bersama, sebagai mitra-kerja, saling membantu dalam kemitraan.

Saat ini, Polri menghadapi berbagai masalah kompleks yang apabila penanganannya tidak profesional akan menjadi bumerang bagi Polri sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru. Seperti kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan, sikap arogansi, salah prosedur, salah tembak, pungli, pemerasan, maraknya penyalahgunaan narkoba, konflik antar suku bangsa maupun perkelahian antar warga masyarakat yang tidak tuntas penanganannya, kenakalan remaja, terorisme, kejahatan kerah putih, ketidaknetralan petugas kepolisian dalam menyelesaikan konflik dan sebagainya. Sedangkan masyarakat selalu menuntut adanya pelayanan prima polisi dan adanya perubahan yang signifikan dalam melaksanakan tugasnya.

Sejalan dengan itu, penyadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan kamtibmas mendapat perhatian yang seksama, sehingga tumbuh kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam mengelola upaya pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum yang sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, serta akan dibarengi dengan pemahaman dan pengertian atas berbagai kendala keterbatasan yang dihadapi oleh institusi Polri dalam upaya peningkatan profesionalismenya, pada dasarnya kemampuan teknis kepolisian saat ini masih belum optimal adapun upaya untuk mengatasi kondisi itu tentu saja

melalui pendidikan dan pelatihan. Motivasi dan etos kerja masih rendah karena profesi ini selalu dikaitkan dengan "kemudahan" mendapatkan uang ketimbang sebagai profesi pengabdian. Pada organisasi apapun baik di dalam maupun luar negeri, motivasi dan etos kerja selalu dikaitkan dengan aspek remunerasi (imbalan), peluang (opportunity), karir, pendidikan, dan lain-lain, serta jaminan-jaminan yang bisa diberikan organisasi.

Dalam era reformasi, pembangunan Polri mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang harus diperbaiki dalam menuju Polri sebagai polisi sipil yang profesional, modern, dan demokratis, secara internal organisasi Polri harus selalu mereformasi diri terutama di bidang pengorganisasian, tata cara kerja, sistem manajemen sumber daya manusia dan sistem rekrutmen, dimana sistem manajemen pendidikan dan pelatihan merupakan bagian integral yang penting mengingat Polri saat ini banyak mendapat kritikan dan tanggapan yang negatif atas kinerjanya. Hal tersebut sebagai gambaran ketidakpercayaan masyarakat akan kinerja Polri di samping itu peran dan fungsi Polri sering dijadikan sebagai alat kekuasaan atau pemerintah yang kadang menyimpang sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Hal tersebut timbul dalam image masyarakat salah satunya dari sikap dan tindakan petugas polisi dalam melaksanakan tugasnya. Mereka sering berlaku yang menyimpang seperti melakukan korupsi, berkolusi dengan para pelanggar hukum. Di dalam organisasi Polri sendiri yang tumbuh dan berkembang adalah para anggotanya berorientasi pada jabatan tertentu yang dianggap basah atau yang mempunyai kewenangan dan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhannya. Hal lain yang juga berkembang adalah sikap loyalitas kepada pejabat tertentu yang dianggap dapat memberikan atau menempatkan pada jabatan-jabatan yang basah tersebut. Pedoman atau acuan keberhasilan kinerjanya bukan pada prestasi kerjanya tetapi kedekatan dan kemampuan melayani atasannya. Dampak dari hal tersebut berkembang sistem yang tidak fair (despotic) yang dikuasai beberapa gelintir elit polisi dan bagi Polri harus dibayar mahal yaitu buruknya citra Polri di mata masyarakat.

Untuk mereformasi Polri menuju polisi yang demokratis dan dipercaya, dicintai dan dibanggakan oleh masyarakatnya salah satunya dengan membangun kebudayaan organisasi Polri, yang dapat dijadikan pedoman atau kerangka acuan bagi setiap anggota Polisi dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam masyarakat.

2) Membangun Budaya Polisi Yang Demokratis

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. "Sebagai pengetahuan, kebudayaan adalah suatu satuan ide yang ada dalam kepala manusia dan bukan suatu gejala (yang terdiri atas kelakuan dan hasil kelakuan manusia).

Sebagai satuan ide, kebudayaan terdiri atas serangkaian nilai-nilai, norma-norma yang berisikan larangan-larangan untuk melakukan suatu tindakan dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan, dan alam, serta berisi serangkaian konsep-konsep dan model-model pengetahuan mengenai berbagai tindakan dan tingkah laku yang seharusnya diwujudkan oleh pendukungnya dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan, dan alam. Kebudayaan polisi yang demokratis dibangun melalui adanya atauran-aturan atau pedoman yang secara legal dan formal yang dapat dihayati dan dijadikan kerangka acuan bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Disamping hal tersebut juga perlunya kesadaran bagi setiap anggota Polisi bahwa dirinya sebagai pelayan keamanan yang dibiayai oleh rakyatnya untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam masyarakat. Hal lain yang penting adalah pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi anggota Polri masyarakat sipil (*civil society*) sebagai landasan demokrasi, Tata hukum, etika dan moral dan tugasnya adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta kepentingan umum. Dalam membangun Kebudayaan Polri di era reformasi dalam menuju masyarakat demokratis hendaknya berdasarkan pengetahuan tersebut di atas dan dijadikan landasan pada aturan - aturan dan kebijaksanaan. Setiap anggota Polri berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya dengan berpedoman :

- a. Kebenaran, kebebasan, kejujuran.
- b. Keadilan atau komunitas atau toleransi.
- c. Cinta dan kasih.
- d. Tanggung jawab dan
- e. Penghargaan terhadap kehidupan.

Dalam membangun kebudayaan Polisi yang demokratis bukanlah hal yang mudah dan cepat untuk dilaksanakan. Dan lagi polisi di masa lalu sebagai bagian dari Abri lebih dari

tiga puluh tahun sehingga pengaruh budaya militer tertanam dalam setiap anggota Polisi Indonesia. Tetapi apabila hal tersebut tidak mulai dirintis secara konsisten dan konsekuen maka situasi dan kondisi kepolisian Indonesia tidak akan lebih baik dari kondisi masa lalu atau bahkan dapat lebih buruk lagi.

Polisi yang demokratis merupakan sistem kepolisian yang berdasarkan pada landasan dasar demokratis dalam melaksanakan pemolisianannya yang secara hakiki mencakup :

- a. Berdasarkan pada Supremasi Hukum.
- b. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM (*Hak Asasi Manusia*).
- c. Adanya transparansi.
- d. Adanya pertanggung jawaban publik (*Accountabilitas Public*).
- e. Pembatasan dan Pengawasan kewenangan kepolisian.
- f. Berorientasi pada masyarakat.

Pentingnya penanaman nilai-nilai dan pengetahuan yang menjadi landasan polisi demokratis hendaknya sudah diajarkan sejak mereka dalam pendidikan dasar kepolisian. Disamping itu perlu adanya keteladanan dan kerelaan pada tingkat elit kepolisian untuk membatasi kewenangan dan mentaati aturan. Sehingga sistem yang berkembang bukan sistem terpusat tetapi adanya pendelegasian kewenangan yang otonom (desentralisasi) dan bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal lain yang penting diperhatikan adalah tingkat kesejahteraan anggota polisi dan pemenuhan kebutuhan operasional untuk menghindarkan tumbuh dan berkembangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam membina organisasi yang senantiasa ditumbuhkembangkan adalah sistem pembelajaran dan sistem kompetisi secara fair dan transparan untuk menghasilkan kreatifitas dan ide - ide baru dalam menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat yang mana Standar keberhasilan Polri bukan lagi diukur keberhasilan mengungkap kasus tetapi manakala kejahatan tidak terjadi, dan tercipta ketertiban serta keteraturan. Polisi hendaknya dapat menjadi simbol persahabatan dengan masyarakat yang cepat dalam menangani laporan atau keluhan serta senantiasa dekat dan dipercaya oleh masyarakatnya.

3) Implementasi Peningkatan Pelayanan

Dalam implementasi jajaran Polres Sambas dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat ini berkat dukungan masyarakat melalui Polmas/Poltramas dan Forum

Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ketapang, maka terbentuk sarana/prasarana di setiap desa/kelurahan serta Sekolah yang ada di jajaran Polres Sambas untuk kebutuhan operasional sehingga diharapkan kebutuhan Polmas secara menyeluruh mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Sambas.

Dukungan tersebut menyangkut peran masyarakat, Peran Pemerintah Desa dan Peran sekolah di Kabupaten Sambas untuk merangsang dan mendorong tumbuhnya respon dan dukungan positif serta kesadaran warga masyarakat untuk bekerjasama dalam membangun kemitraan melalui layanan jaringan komunikasi membuka akses sebagai basis dari kinerja Polisi dengan masyarakat.

Dalam implementasi Polmas melalui Poltramas dan Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sambas maka terbentuk sarana/prasarana di setiap desa/kelurahan serta sekolah-sekolah yang ada di jajaran Polres Sambas untuk kebutuhan operasional sehingga diharapkan kebutuhan Polmas secara menyeluruh mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Sambas.

Dukungan tersebut menyangkut peran masyarakat, Peran Pemerintah Desa dan Peran sekolah untuk merangsang dan mendorong tumbuhnya respon dan dukungan positif serta kesadaran warga masyarakat untuk bekerjasama dalam membangun kemitraan melalui layanan jaringan komunikasi membuka akses sebagai basis dari kinerja Polisi dengan masyarakat melalui :

- a. Rumah Mitra Polisi di setiap Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial / kejahatan yang dapat membawa implikasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Polisi Mitra Sekolah yang bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap anak-anak sekolah dan mengantisipasi berbagai permasalahan kenakalan remaja serta penanggulangan Narkoba di lingkungan sekolah.
- c. Kerjasama antara TNI, Polri dan Pemerintah Desa/ Kelurahan serta Kecamatan yang bertujuan membangun dan membentuk kemitraan TNI Polri dan pemerintah Desa/Kelurahan serta Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan

bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI; dan meningkatkan kualitas masyarakat.

- d. Pemasangan Pamflet dan sependuk himbauan Kamtibmas yang bertujuan untuk menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ketapang sadar hukum dalam harkamtibmas dan kerjasama keamanan dan ketertiban.
- e. Penyampaian Nomor Handphone/E-mail/PIN Blackbery Kapolres Ketapang yang bertujuan untuk mempermudah mengoptimalkan Laporan Informasi / Permasalahan yang disampaikan Masyarakat melalui HP / SMS dalam melaksanakan koordinasi dan membarikan informasi tentang gangguan Kamtibmas di jajaran Polres Ketapang.

Rumah tersebut bertujuan untuk menjangkau masyarakat desa terpencil yang ingin melaporkan suatu kejadian maupun menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan melalui SMS, Telpn maupun datang langsung ke rumah tersebut. Tugas yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk petugas Polmas/ Babinkamtibmas masing-masing Kelurahan/Kepala Desa adalah :

- a. Mendatakan setiap laporan permasalahan warga masyarakat.
- b. Membantu petugas Polmas/Babinkamtibmas dalam mensosialisasikan himbauan Kamtibmas terhadap warga di wilayah hukum Polres Sambas.

Hal ini membuktikan bahwa fungsi dan peran FKPM adalah merupakan bentuk akuntabilitas operasional Polri Polres Sambas dan jajarannya pada masyarakat tingkat Desa / Kelurahan dengan harapan adanya hubungan yang harmonis dan kerjasama dengan berbagai pihak guna menumbuh kembangkan rasa saling percaya dan saling menghargai kredibilitas serta luwes, supel dan fleksibel.

Kesimpulan

Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak Polres Sambas dalam pengamanan Festival Tahunan Cap Go Meh di Kabupaten Sambas, dengan cara :

- a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepolisian secara optimal, menjalin kemitraan Polri dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, memantapkan kemitraan Polri dengan Masyarakat, serta meningkatkan kemampuan, watak, jati diri dan profesionalitas

personil Polri secara berkelanjutan.

- b. Melakukan penangkalan, terhadap kondisi “ambang gangguan” kamtibmas dengan sasaran untuk mengurangi “faktor kesempatan” dan menurunkan “faktor niat” melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- c. Melakukan penegakan hukum terhadap "ancaman nyata" kamtibmas secara tegas, konsekuen dan konsisten berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdul Gaffar Karim, 2003, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Ahmad Nadir, 2005, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, Averroes Press, Malang.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, Pilkada Langsung Problem dan Prospek, Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005, Pustaka Pelajar, Semarang
- Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, UNPAD, Bandung.
- Daniel S. Salossa, 2005, Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Denny Indrayana, Setya Arianto, A. Ahsin Thohari, Topo Santoso, Susi Dewi Harijanti, Lilis Mulyani, V.A Sapada, 2006. Jurnal Demokrasi dan Ham; Reformasi Hukum, Vol. 7 No. 1, 2007.
- Edwin, Donni, 2005. PilkadaLangsung :Demokratisasi Daerah danMitos Good Governance, Jakarta : Patner Ship : Jakarta.
- Esmi Warassih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama,Semarang.
- Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. Alumni, Bandung.
- Kacung Marijan, 2006, *Demokratisasi di Daerah; Pelajaran dari Pilkada Langsung*, Pusat Studi Demokrasi dan HAM PusDeham, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Morissan, 2005, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakarsa, Jakarta.
- Muhammad Asfar, 2006, Mendesain Managemen Pilkada, Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan Ham, Surabaya.
- Nasution, 1988, Metode Penelitian Nuturalistik-kualitatif, Tarsito, Bandung
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam